



# **Efisiensi Anggaran 2025**

**Jessica Arreta**

**24 Februari 2025**

# Ringkasan Eksekutif

Kabinet Merah Putih saat ini sedang melakukan sebuah langkah 'penghematan' guna memperoleh **tambahan penerimaan** yang ditargetkan mencapai **Rp750 triliun**. Terdapat tiga tahap yang dilakukan, yakni penghematan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), efisiensi belanja K/L yang sedang dilakukan saat ini, dan setoran dividen BUMN. Spesifik pada efisiensi K/L, Presiden Prabowo melalui **Inpres Nomor 1 Tahun 2025** mengamanatkan pemberlakuan **efisiensi** belanja dalam APBN 2025 senilai **Rp306,69 triliun** yang terdiri atas potongan efisiensi Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp50 triliun.

Pemangkasan tersebut hanya berlaku pada **16 pos belanja** yang berkaitan dengan **belanja barang dan belanja modal**. Besaran pemotongan anggaran secara spesifik didiskusikan oleh K/L terkait bersama dengan DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Perhitungan akhir DPR RI mencatat hasil tambahan anggaran yang diperoleh dari pemotongan belanja K/L mencapai **Rp308 triliun**, lebih banyak dari target yang ditetapkan. Jika dirinci besaran pemotongan per K/L, **Kementerian Ketenagakerjaan** tercatat sebagai kementerian dengan **pemangkasan terbesar** mencapai 56,14%. Sementara itu, **Kementerian Sosial** serta **Badan Gizi Nasional** menjadi K/L dengan **pemangkasan terkecil**.

Sejauh ini, **realokasi** anggaran dari hasil efisiensi **belum terdapat peraturan formal**. Namun Presiden menyampaikan bahwa efisiensi anggaran akan digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti **MBG dan Danantara**. Kebijakan ini menuai pro-kontra dari masyarakat yang memandang realokasi tidak sesuai dengan dampak yang harus ditanggung seperti **PHK pegawai non-ASN, kemandirian fiskal** daerah yang terdampak karena transfer pusat berkurang, hingga **pertumbuhan ekonomi** yang berpotensi menurun. Terkait pertumbuhan ekonomi, pengaruh efisiensi dapat dilihat dari **penurunan permintaan produksi sektor manufaktur**. Hal ini tentunya akan memengaruhi posisi manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian.

# Tiga Tahap Efisiensi Anggaran

Penghematan  
Bagian  
Anggaran  
BUN sebesar  
**Rp300  
triliun**

Sudah lama  
dilakukan oleh  
Kementerian  
Keuangan  
melalui berbagai  
instrumen  
seperti  
*automatic  
adjustment*



Efisiensi  
Belanja di  
Seluruh K/L  
sebesar  
**Rp250  
triliun**

Berdasarkan  
Inpres 1/2025.  
Penyisiran DPR  
RI menemukan  
hasil efisiensi  
belanja lebih  
dari target,  
mencapai  
**Rp308 triliun.**

Sejumlah Rp58  
triliun akan  
dikembalikan  
kepada 17/K/L



Dividen  
BUMN  
sebesar  
**Rp200  
triliun**

Komitmen  
BUMN untuk  
memberikan  
dividen  
ditargetkan  
mencapai  
**Rp300 triliun.**

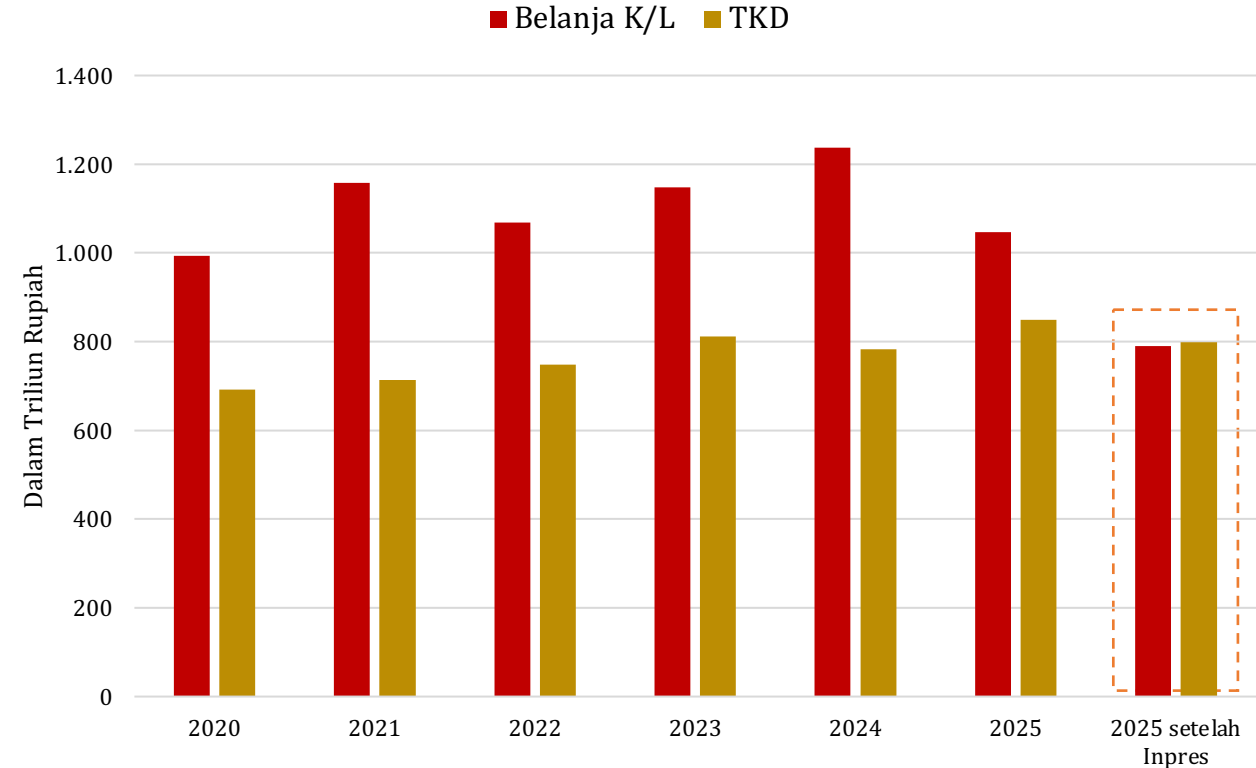
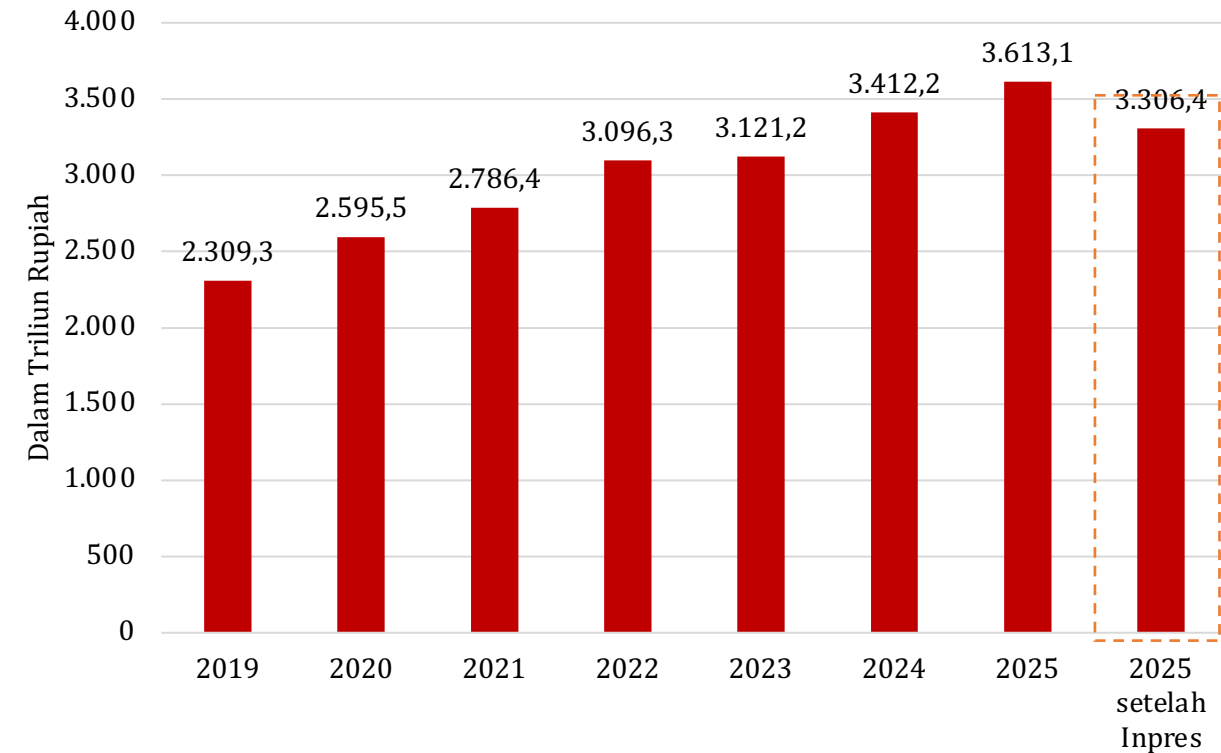
Sekitar Rp100  
triliun akan  
dikembalikan ke  
BUMN sebagai  
modal kerja



Dana Pemerintah  
**Rp750 triliun**

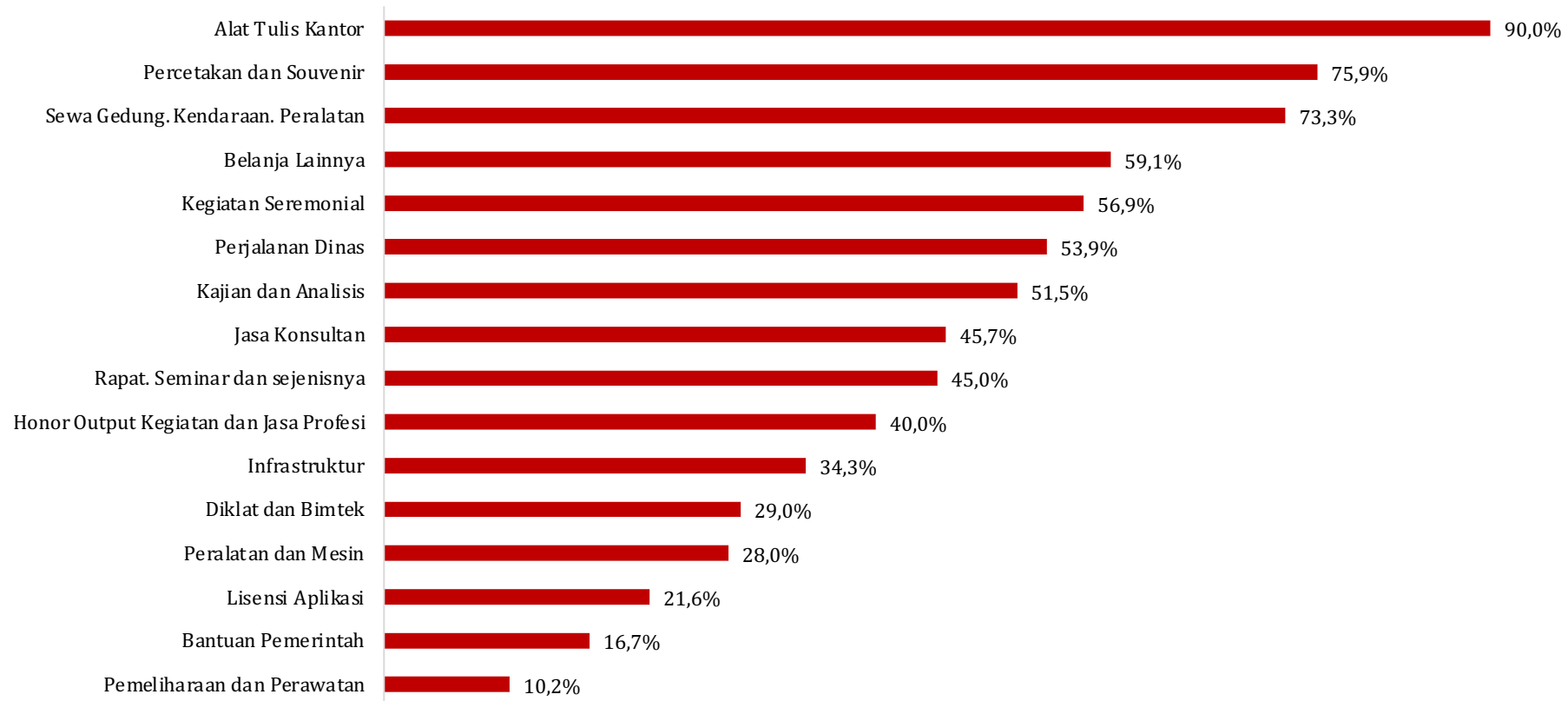
# Efisiensi Anggaran berdasarkan Inpres 1/2025

Postur Belanja APBN, 2019-2025



Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN 2025 senilai **Rp306,69 triliun**, dengan rincian **Rp256,1 triliun** bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan **50,59 triliun** untuk transfer ke daerah. Kementerian Keuangan menindaklanjuti instruksi tersebut melalui Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025 tentang efisiensi K/L dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah. Dengan itu, **total postur belanja APBN 2025 ditekan menjadi Rp3.306,41 triliun**.

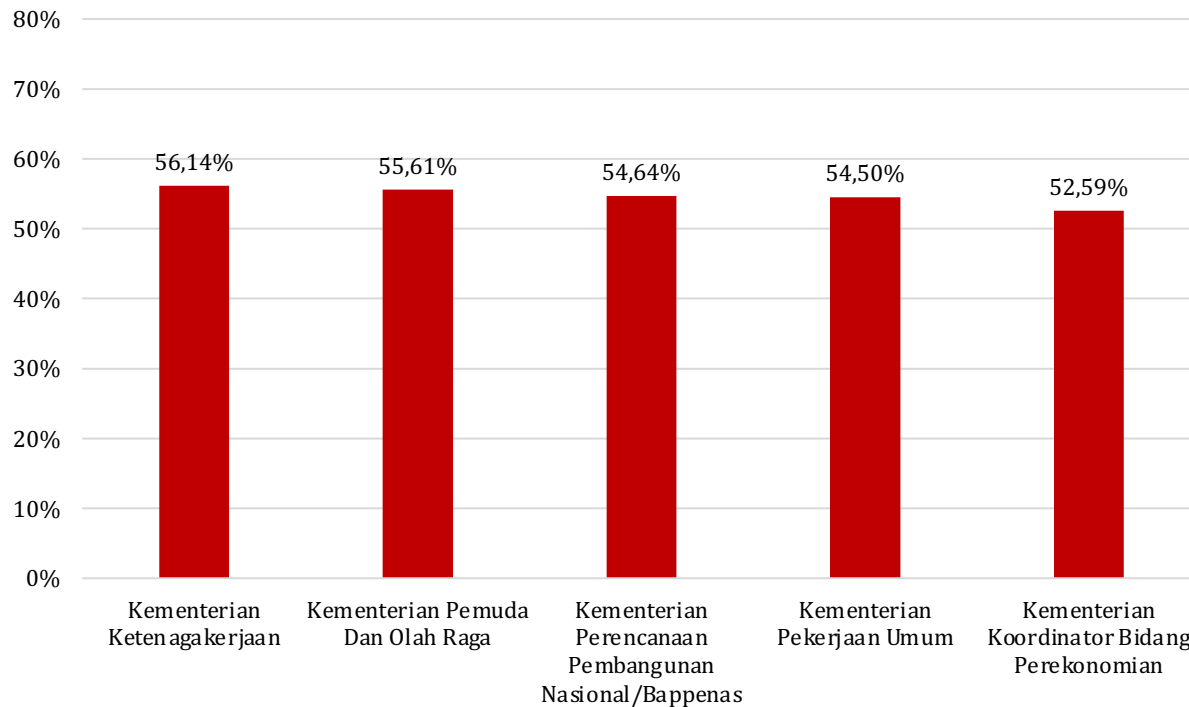
# Item Efisiensi Berdasarkan Pos Belanja



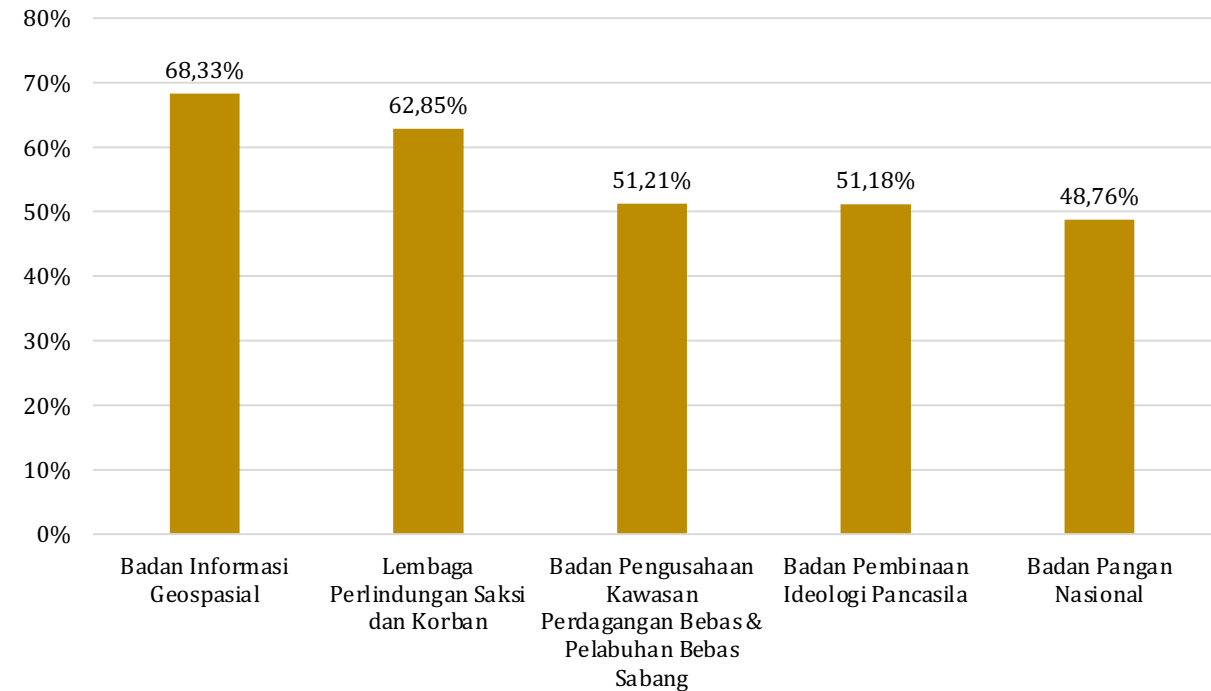
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, penghematan anggaran hanya menyentuh **belanja barang dan belanja modal** yang dianggap **tidak produktif**. Belanja esensial seperti pelayanan publik, belanja pegawai, PSO, dan bantuan sosial tidak termasuk dalam program efisiensi. Setidaknya terdapat **16 pos belanja** yang dapat **dipangkas** seperti ATK, percetakan dan souvenir, kegiatan seremonial, hingga perjalanan dinas dengan besaran potongan yang bervariasi. Setiap K/L dapat mengajukan dan menentukan rencana efisiensi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI sebelum besaran potongan ditentukan. Setelah RDP, **total efisiensi dihitung naik menjadi Rp308 triliun**.

# Top 5 K/L dengan Pemangkasan Terbesar

Kementerian

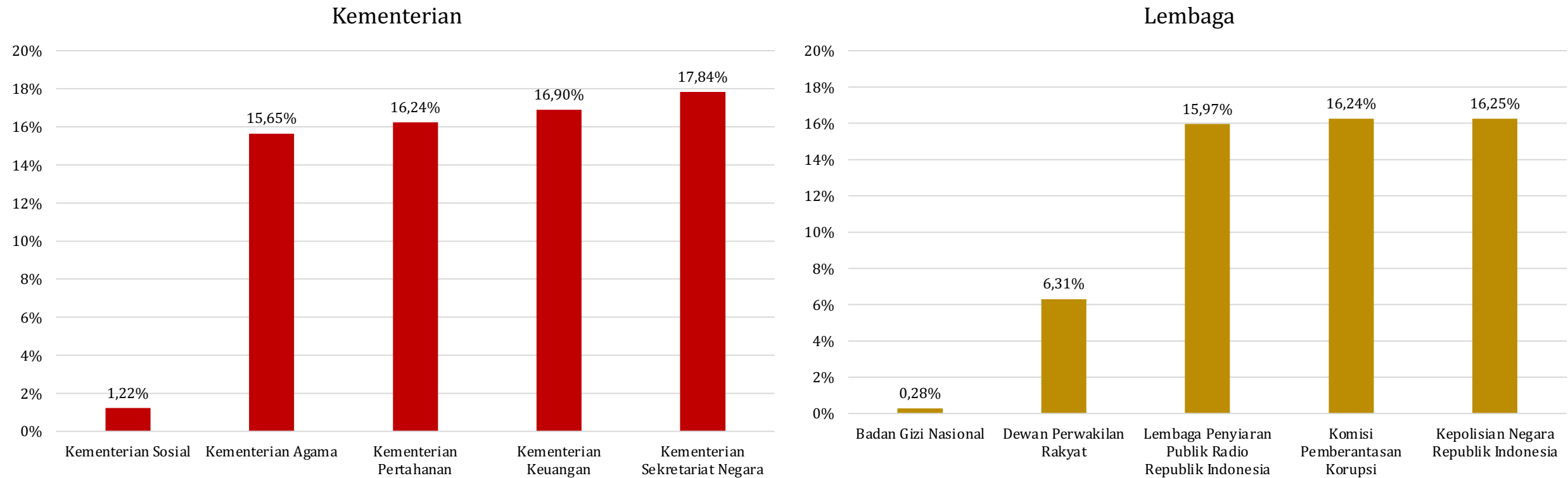


Lembaga



Seluruh K/L mengalami pemangkasan anggaran dengan besaran persentase berbeda-beda. Jika dirinci berdasarkan organisasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Informasi Geospasial menjadi K/L dengan **pemangkasan terbesar**. Anggaran **Kementerian Ketenagakerjaan** dipangkas sebesar **56,14%** dengan efisiensi Rp2,7 triliun dari pagu awal Rp4,8 triliun. Kebijakan ini membuat Kemnaker harus **menunda pelaksanaan pelatihan** berbasis kompetensi yang sudah dijadwalkan seperti pelatihan teknisi, pelatihan operator hingga penerbitan sertifikat. Selanjutnya, **Badan Informasi Geospasial** mengalami efisiensi terbesar di lingkup lembaga sekaligus secara K/L keseluruhan dengan besaran **68,33%** atau Rp143 miliar dari pagu awal Rp209,28 triliun. **Rata-rata pemangkasan** anggaran seluruh K/L berkisar **25,8%** dari anggaran awal yang tercantum dalam APBN 2025.

# Bottom 5 K/L dengan Pemangkasan Terkecil



Kementerian Sosial serta Badan Gizi Nasional menjadi K/L dengan **pemangkasan terkecil**. Anggaran **Kementerian Sosial** hanya dipangkas **1,22%** dengan efisiensi sebesar Rp970 miliar dari pagu awal Rp79,59 triliun. Selain Kemensos, pemangkasan terkecil juga terjadi pada Kementerian Agama (15,65%); Kementerian Pertahanan (16,24%); Kementerian Keuangan (16,90%); dan Kementerian Sekretariat Negara (17,84%). Selanjutnya, **Badan Gizi Nasional** diefisiensi sebesar **0,28%** atau Rp200 miliar dari pagu awal Rp71 triliun. Sebagai catatan, pagu tersebut **belum memperhitungkan tambahan anggaran Rp100 triliun** yang telah disetujui. Adapun lembaga lain yang mengalami sedikit pemotongan adalah DPR RI (6,31%); LPP RRI (15,97%); KPK (16,24%); dan Polri (16,25%).

# Realokasi Hasil Efisiensi

Hingga saat ini, **belum ada informasi spesifik** penggunaan anggaran hasil efisiensi. Akan tetapi berdasarkan informasi yang diterima, didapati bahwa anggaran di-realokasikan untuk beberapa program seperti:

## Makan Bergizi Gratis

MBG yang sebelumnya dianggarkan Rp71 triliun telah mendapat tambahan hingga **Rp100 triliun** per Januari 2025

Presiden Prabowo akan menggunakan dana penghematan 24 miliar Dolar AS atau **Rp388 triliun** (asumsi kurs Rp16.100) untuk mendukung program MBG

## Danantara

Pembangunan 15 hingga 20 proyek raksasa oleh BPI Danantara melalui investasi 20 miliar Dolar AS atau **Rp325 triliun** (asumsi kurs Rp16.100)

Proyek hanya mengandalkan **investasi domestik** yang berfokus pada swasembada energi, hilirisasi industri, dan swasembada pangan

### Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahap Dua Ditambah Rp 100 Triliun

Ahmad Viqi - detikBali  
Senin, 10 Feb 2025 08:19 WIB



Foto: Anggota Komisi X DPR RI Muazzim Akbar saat ditemui di kediamannya, Minggu malam (9/2/2025). (Ahmad Viqi/detikBali)

### Dana Rp325 T Hasil Efisiensi APBN Akan Diserahkan Prabowo ke Danantara

CNN Indonesia  
Senin, 17 Feb 2025 07:57 WIB

Bagikan:





# Mata Anggaran K/L yang Terkena Pemotongan Besar berdasarkan Fungsi Pendidikan dan Infrastruktur

## Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- **Pengembangan Prestasi dan Talenta** dipangkas 86%;
- **Beasiswa Prestasi** seperti Beasiswa Unggulan, Darmasiswa, dan BIM dipangkas 50%;
- **Pengembangan Pendidikan Sains dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara** dipangkas 60%.

## Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

- **Tunjangan Dosen non-ASN** diefisiensi 25%;
- **Beasiswa dosen** dan tendik di dalam dan luar negeri serta **beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)** yang diefisiensi 25%;
- **Bantuan lembaga pendidikan** seperti sekolah dan PTN/PTS dipangkas 50% sampai 60%.

## Kementerian Pekerjaan Umum

- **Ketahanan sumber daya air** diefisiensi 72%, dengan rincian pembangunan bendungan dan irigasi;
- **Perumahan dan kawasan permukiman** diefisiensi 67%, mencakup penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengembangan kawasan;
- **Infrastruktur konektivitas** dipotong 65%. Program mencakup pembangunan jalan baru, jalan tol, dan jembatan.

Studi mencoba melihat **mata anggaran** yang mengalami pemangkasan terbesar berdasarkan tupoksi K/L dalam menjalankan fungsi belanja esensial seperti **pendidikan dan infrastruktur**. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 3 K/L yang berkaitan dengan fungsi tersebut yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan Kementerian Pekerjaan Umum. Matriks di atas menunjukkan bahwa **cukup banyak mata anggaran esensial yang mengalami pemangkasan** seperti **beasiswa** serta **bantuan sekolah/PTN/PTS** bagi fungsi pendidikan dan program **perumahan serta konektivitas** bagi fungsi infrastruktur.

# Dampak Efisiensi

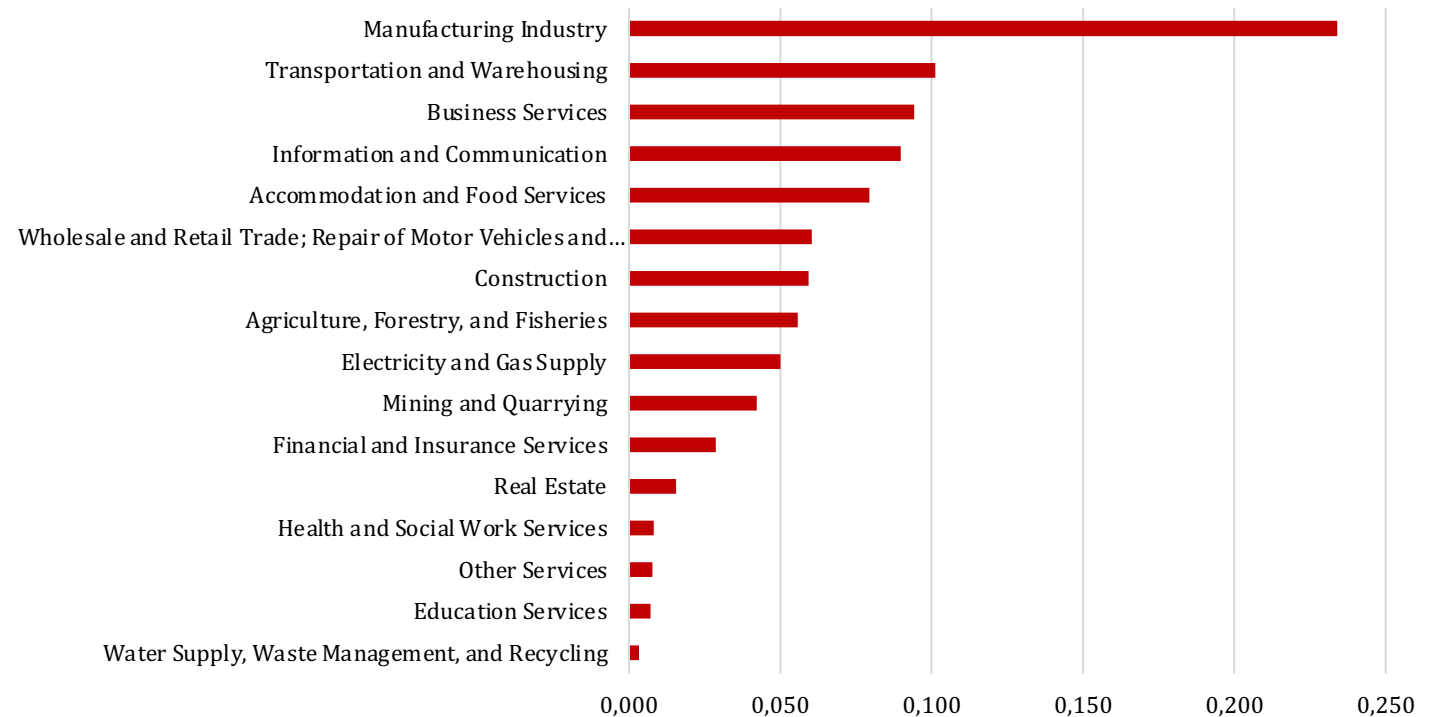
## Level Makro

PHK Pegawai Non-ASN

Potensi penurunan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional

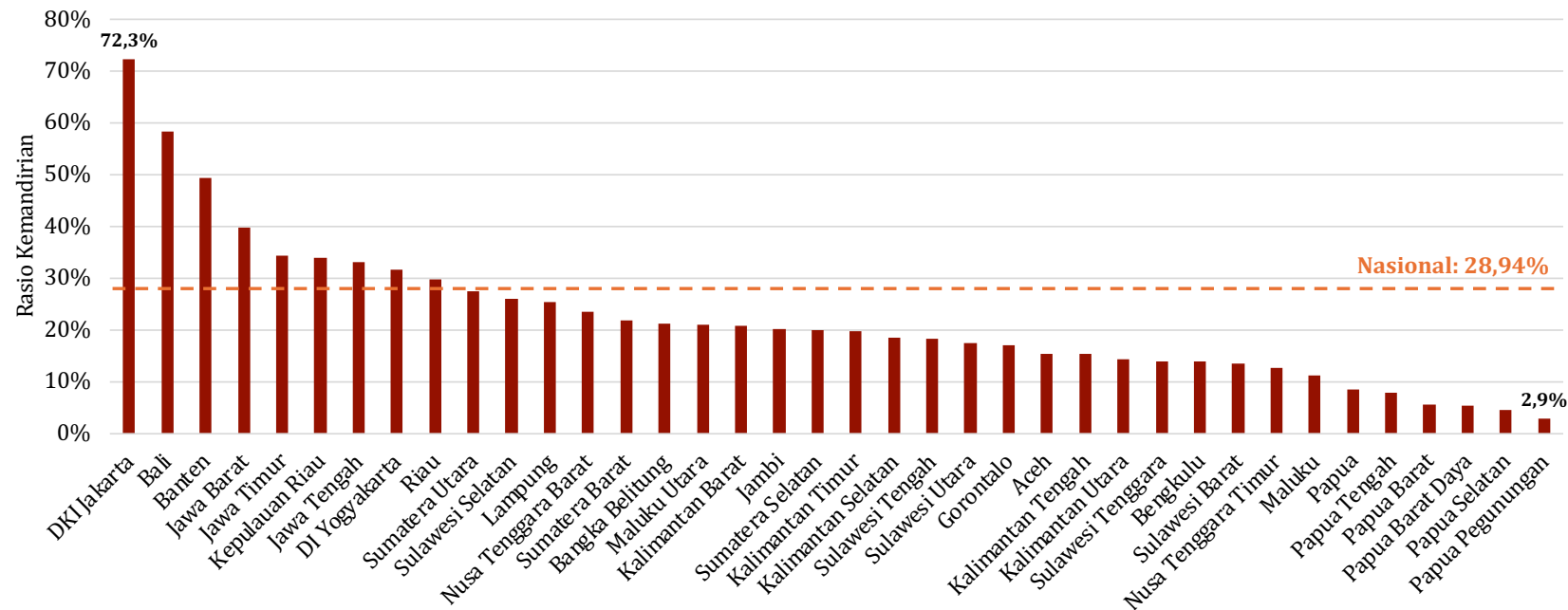
Kemandirian fiskal daerah berkurang

## Level Sektoral



Dampak kebijakan efisiensi dapat dilihat dari **dua level**, yakni makro dan sektoral. Pada kacamata **makro**, dampak terlihat pada beberapa aspek seperti: (1) **PHK** pegawai non-ASN; (2) Potensi **penurunan pertumbuhan ekonomi** daerah dan nasional, dan (3) semakin **rendahnya kemandirian fiskal daerah** karena transfer pusat berkurang. Pada kacamata **sektoral**, pengaruh efisiensi dapat dilihat melalui **forward linkage**. *Forward linkage* merupakan angka yang menggambarkan tambahan permintaan produksi satu sektor terhadap sektor lainnya ketika output di sektor lain bertambah. Ketika dilihat dari *forward linkage* belanja pemerintah (administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial), terlihat bahwa ada keterkaitan besar terhadap sektor manufaktur. Setiap **kenaikan realisasi belanja pemerintah Rp1 triliun mendorong permintaan produksi sektor manufaktur Rp234 miliar**. Dalam hal ini, sektor manufaktur merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan efisiensi belanja, akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi utamanya pada produksi manufaktur.

# Kemandirian Fiskal Daerah



\*) Perhitungan menggunakan akumulasi seluruh kabupaten/kota setiap provinsi

**Rasio Kemandirian Daerah** menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.

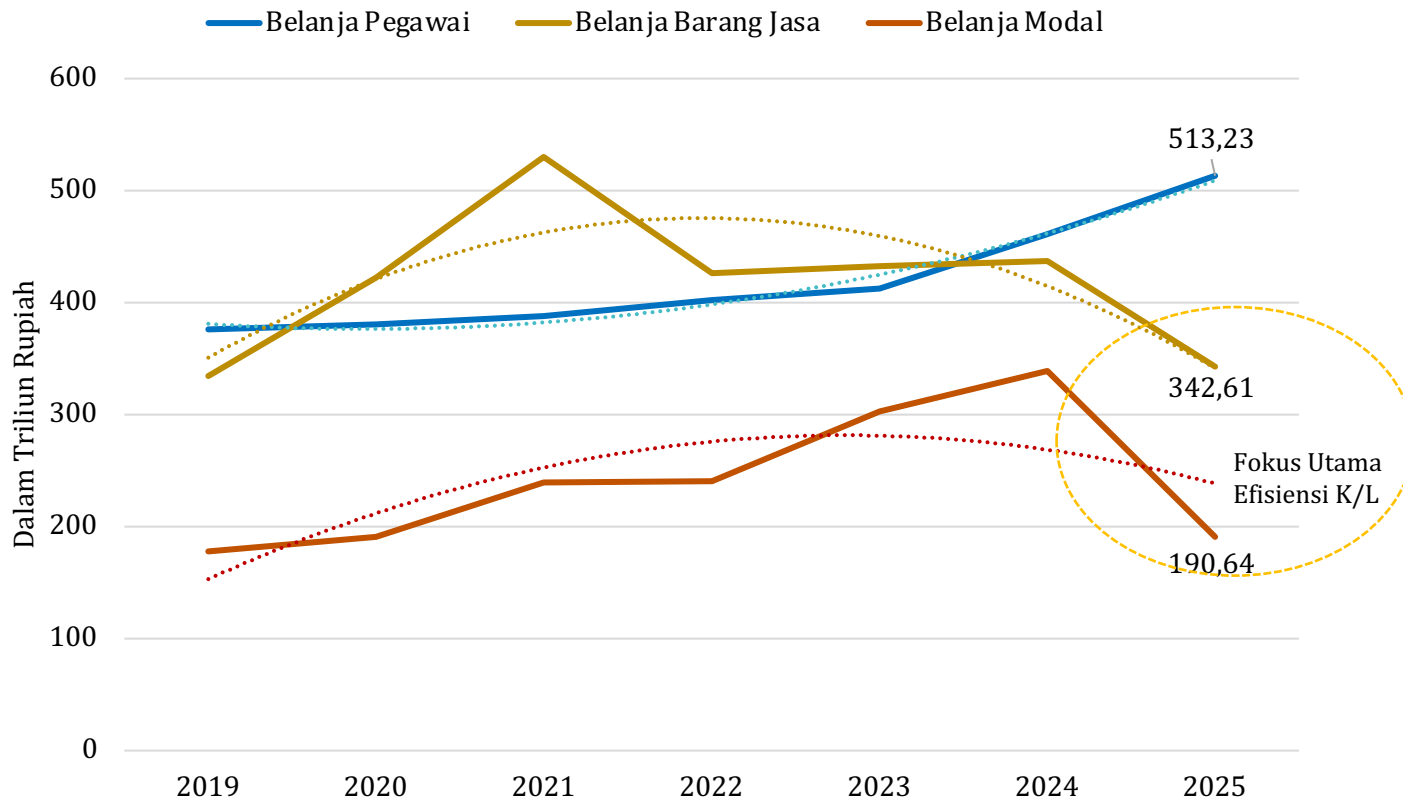
$$\text{Rumus: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

Nilai IKF	Kondisi
0,00-0,25	Belum Mandiri
0,25-0,50	Menuju Kemandirian
0,50-0,75	Mandiri
0,75-1,00	Sangat Mandiri

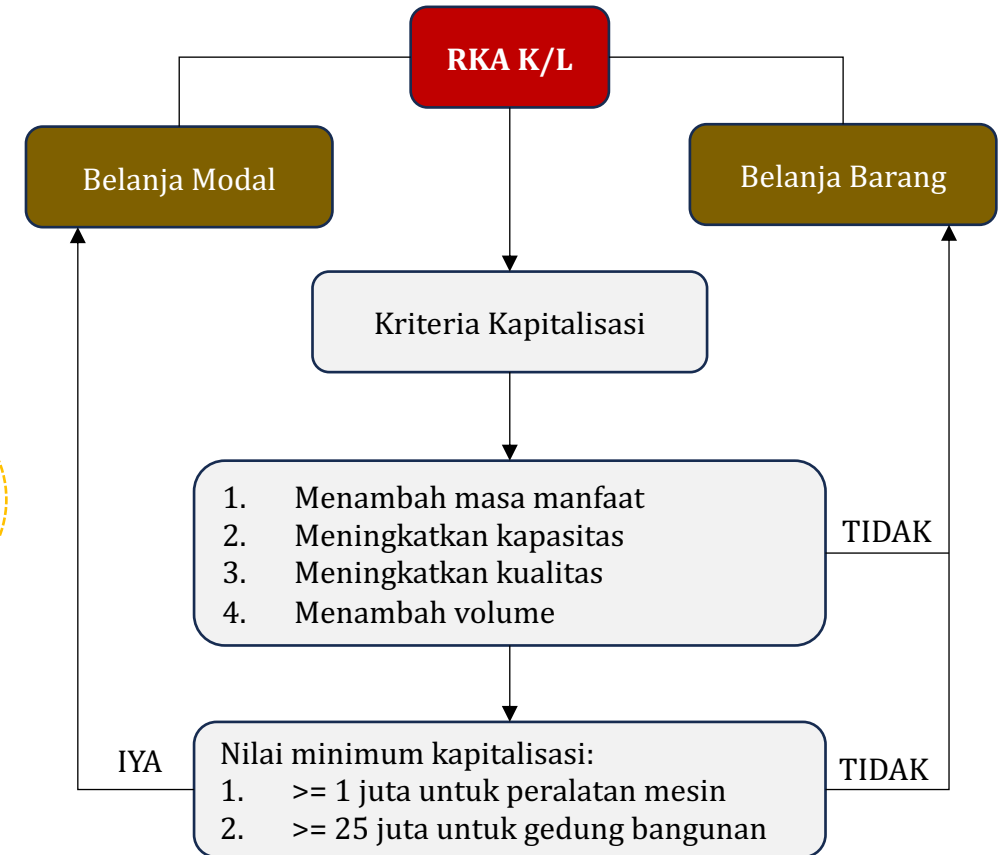
Perhitungan rasio kemandirian fiskal menunjukkan mayoritas daerah memiliki tingkat **kemandirian** yang **relatif rendah**. Sebagai catatan, semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang lebih tinggi. Dari 38 provinsi yang diukur, terlihat hanya **DKI Jakarta dan Bali** yang berstatus **mandiri** dengan rasio di atas 50%. Bila dibandingkan dengan rerata nasional, tercatat hanya 9 provinsi yang memiliki nilai di atas 28,94%. Temuan ini menunjukkan perlunya **optimalisasi peran pemerintah daerah** dalam membiayai program pembangunan yang lebih **independen** dan sesuai **prioritas daerah**. Kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain pemberdayaan penerapan pajak dan redistribusi daerah, pemberdayaan UMKM, hingga penggalan potensi ekonomi lokal.

# Belanja Rutin APBN

Belanja Rutin, 2019-2025



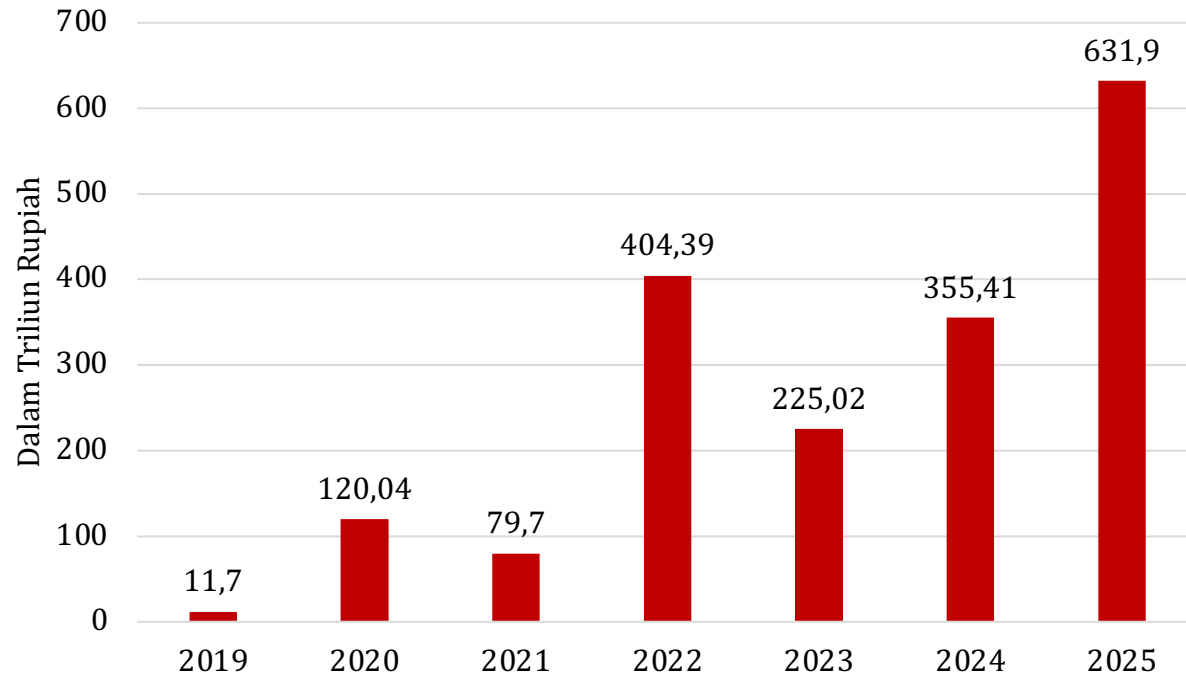
Permenkeu 62/2023 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan



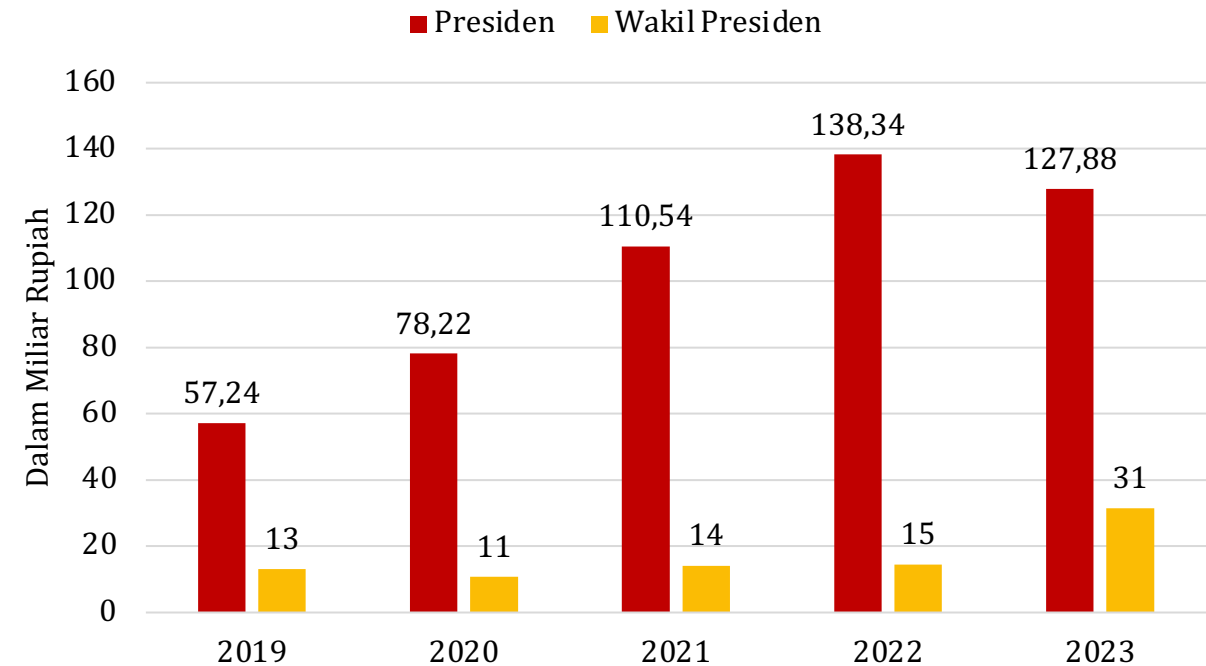
Secara historis, tren belanja pegawai dalam APBN mengalami kenaikan secara persisten. Pada saat bersamaan, **belanja modal** serta **belanja barang dan jasa** menurun, utamanya pada tahun anggaran 2025. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyusunan APBN kala itu memang telah **mempertimbangkan ‘efisiensi’** pada dua pos belanja tersebut. Sebagai catatan, penurunan pos belanja tersebut belum memperhitungkan keputusan efisiensi yang mengamputasi anggaran K/L sebesar Rp256,1 triliun. Bila hal itu dipertimbangkan, **total belanja modal dan belanja barang-jasa yang disetujui hanya sebesar Rp151,97 triliun** untuk tahun 2025.

# Belanja Lain-Lain dalam APBN

Perkembangan Belanja Lain-Lain dalam APBN





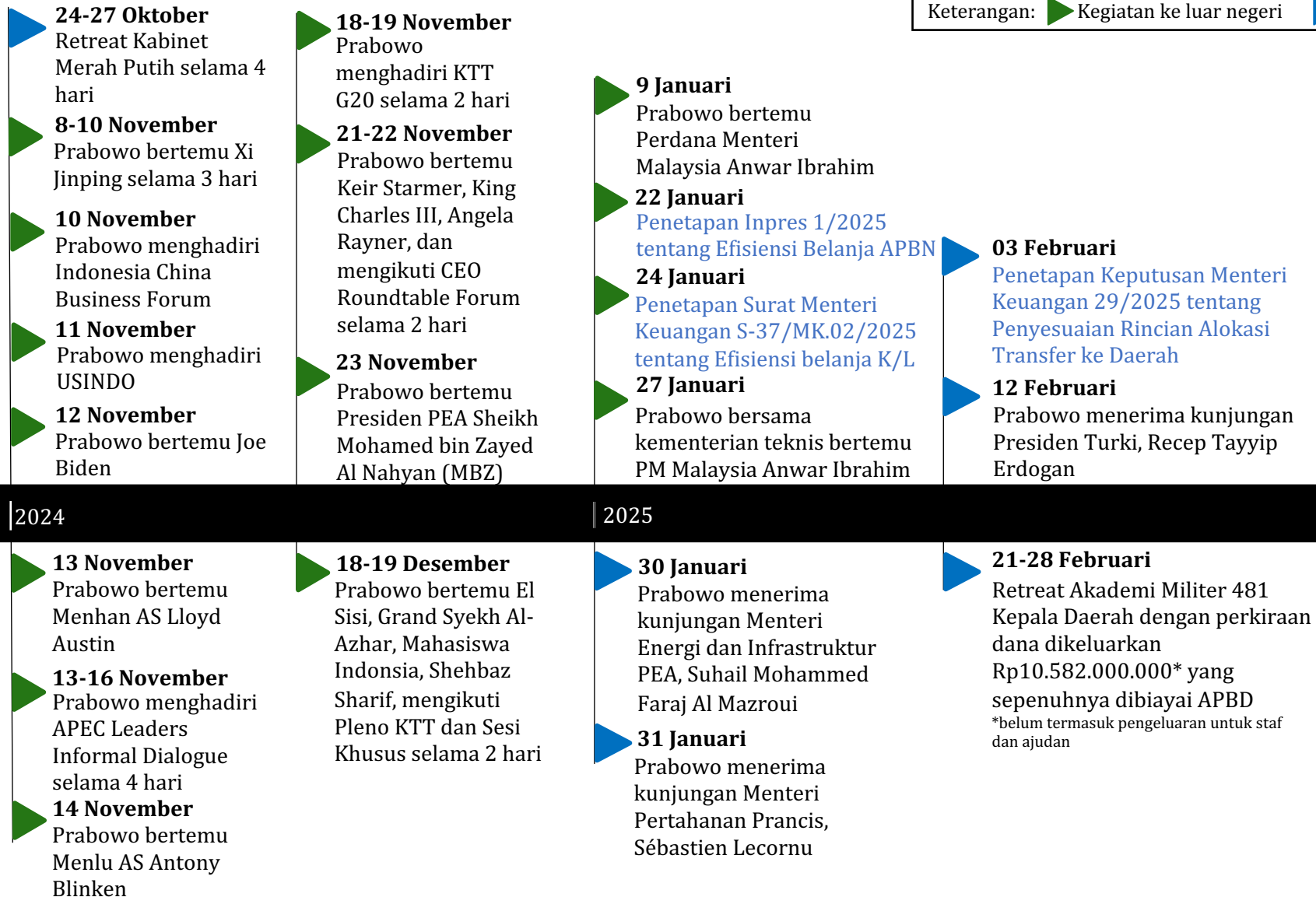
Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden



**Belanja Lain-Lain** dalam APBN mengalami perkembangan yang cenderung **fluktuatif** setiap tahunnya. Akan tetapi, terlihat mencapai puncaknya pada tahun anggaran **2025** mencapai **Rp631,9 triliun**. Belanja Lain-Lain merupakan jenis belanja negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang **tidak termasuk** dalam kategori belanja umum seperti belanja pegawai, barang, modal, pembayaran kewajiban utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Salah satu mata anggaran dalam belanja tersebut adalah belanja operasional milik Presiden dan Wakil Presiden. **Pada grafik kanan, terlihat bahwa anggaran operasional Presiden dan Wakil Presiden** mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan sejak 2019 hingga 2023, terjadi **peningkatan hingga 126%** untuk belanja tersebut. Adapun peruntukkan belanja tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksudkan sebagai dana operasional Presiden/Wakil Presiden untuk **kebutuhan bantuan kemasyarakatan**.

# Lini Masa Kunjungan Prabowo di tengah Efisiensi

Keterangan:  Kegiatan ke luar negeri  Kegiatan dalam negeri



# Rekomendasi

Selain melakukan pemangkasan anggaran yang berpotensi memengaruhi target pertumbuhan ekonomi 2025, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan pemangku kebijakan terkait optimalisasi anggaran. Pertama, pemerintah dapat mempertimbangkan **penundaan proyek pembangunan IKN**. Saat ini, masih banyak proyek yang didanai oleh APBN akibat target investasi swasta yang tidak mencapai target. Jika penundaan diberlakukan, pos anggaran yang ada dapat direalokasikan kepada sektor yang memiliki *multiplier effect* lebih besar.

Kedua, **peningkatan penerimaan negara** melalui optimalisasi penerimaan pajak maupun bukan pajak. Dalam hal pajak, perluasan basis pajak dilakukan melalui penerapan *core tax*. Berbagai kendala dalam pelaksanaan reformasi perpajakan ini dapat dilakukan uji ulang untuk mengoptimalkan potensi pendapatan. Selain itu, perumusan objek pajak baru dapat dipertimbangkan apabila skenario menaikkan tarif pajak tidak memungkinkan. Penggalan potensi pajak ini dapat mempertimbangkan lapisan wajib pajak baru seperti pajak harta orang kaya dan pajak komoditas ekstraktif. Selanjutnya terkait penerimaan bukan pajak, kebijakan dapat diarahkan kepada pemanfaatan SDA yang lebih optimal serta diversifikasi sumber PNBPN yang tidak terpusat pada SDA.

Ketiga, **pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL)** yang dihimpun oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Pada tahun anggaran 2024, *outlook* defisit yang dirancang 2,7% PDB ternyata hanya terealisasi 2,29% PDB. Dengan kata lain, tersisa potensi 0,41% atau **Rp101,8 triliun** yang belum dimanfaatkan. Tambahan lagi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 sebesar **Rp45,4 triliun** menambah bantalan SAL menjadi **Rp505 triliun** yang dapat dialokasikan untuk berbagai penggunaan seperti kebutuhan kas temporer, pembiayaan anggaran, hingga *fiscal buffer*.

Terakhir, pertimbangan **pembentukan dewan fiskal** yang independen sebagai pengawas praktik kebijakan fiskal yang dilakukan oleh otorita terkait seperti Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dewan fiskal dapat berfungsi sebagai penasihat yang memberikan rekomendasi bagi terwujudnya keberlanjutan fiskal jangka panjang.

# Lampiran



# Kegiatan Prabowo Dalam Negeri

## Menerima Kedatangan

Acara Kedatangan	Sesi	Tanggal	Akomodasi	Ceremony	Lama Kunjungan	Jumlah Rombongan Tamu	Pejabat yang hadir
UAE	Prabowo-Suhail	30 Januari 2025	-	-	1 hari	- Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab (PEA), Suhail Mohamed Al Mazrouei - Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheeri	- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Hashim Djojohadikusumo
Prancis	Prabowo-Sébastien Lecornu	31 Januari 2025	-	-	1 hari	- Menteri Pertahanan Prancis H.E. Mr. Sebastien Lecornu	- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Turki	Prabowo-Erdoğan	12 Februari 2025	-	-	1 hari	- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan	- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

## Kegiatan Lainnya

Kegiatan	Sesi	Tanggal	Akomodasi	Ceremony	Lama Kegiatan	Keterangan
Retreat Kabinet Merah Putih	Bersama para menteri	24-27 Oktober 2025	v	-	5 hari	
Retreat Akademi Militer 481 Kepala Daerah	Bersama 481 Kepala Daerah	21-28 Februari 2025	v	-	8 hari	- Kepala daerah melakukan <i>glamping</i> - Telan anggaran 10 miliar, bersumber dari APBN bersumber dari DIPA Kemendagri

# Kegiatan Prabowo Luar Negeri

Acara Kedatangan	Sesi	Tanggal	Akomodasi	Ceremony	Lama Kunjungan	Jumlah Rombongan
Turki			v	v		- Mayor Teddy - Menlu
Tiongkok	Prabowo-Xi Jinping	8-10 November 2024	v	v	3 hari	- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Menteri Luar Negeri, Sugiono - Menteri ESDM, Bahlil Ladhalia - Wakil Menteri Pertahanan, Doni Hermawan - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali
Tiongkok	Indonesia China Business Forum	10 November 2024	-	-	1 hari	- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto - Deputy Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novian Bakrie
Amerika Serikat	Prabowo-Biden	12 November 2024	v	-	1 hari	- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Menteri Luar Negeri, Sugiono
Amerika Serikat	Prabowo-USINDO	11 November 2024	v	-	1 hari	- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani - Menteri Luar Negeri, Sugiono - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie - KUIA KBRI Washington DC, Ida Bagus Made Bimantara
Amerika Serikat	Prabowo-Lloyd Austin (Door stop)	13 November 2024	v	-	1 hari	- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Menteri Luar Negeri, Sugiono
Amerika Serikat	Prabowo-Blinken	14 November 2024	v	-	1 hari	

# Kegiatan Prabowo Luar Negeri

Acara Kedatangan	Sesi	Tanggal	Akomodasi	Ceremony	Lama Kunjungan	Jumlah Rombongan
Turki			v	v		- Mayor Teddy - Menlu -
APEC	APEC Leaders Informal Dialogue	13-16 November 2024	v	-	4 hari	- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Menteri Luar Negeri, Sugiono - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto - Menteri Perdagangan, Budi Santoso - Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman
G20	KTT G20	18-19 November 2024	v	-	2 hari	- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto - Menteri Luar Negeri, Sugiono - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Inggris	Prabowo bertemu Keir Starmer, King Charles III, Angela Rayner, dan mengikuti CEO Roundtable Forum	21-22 November 2024	v	-	2 hari	- Menteri Luar Negeri Sugiono - Menteri Keuangan Sri Mulyani - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Djiwandono.
UAE	Prabowo-MBZ	23 November 2024	-	v	1 hari	- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Menteri Luar Negeri Sugiono - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasia Roeslani - Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Dubes RI untuk UEA Husin Bagis - Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri

# Kegiatan Prabowo Luar Negeri

Acara Kedatangan	Sesi	Tanggal	Akomodasi	Ceremony	Lama Kunjungan	Jumlah Rombongan
Turki			v	v		- Mayor Teddy - Menlu
D8	Prabowo bertemu El Sisi, Grand Syekh Al-Azhar, Mahasiswa Indonsia, Shehbaz Sharif, mengikuti Pleno KTT dan Sesi Khusus	18-19 Desember 2024	v	v	2 hari	- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas - Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf
Malaysia	Prabowo-Ibrahim	9 Januari 2025	-	-	1 hari	- Menteri Luar Negeri Sugiono - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
India	Prabowo-Modi	25-31 Januari 2025	v	v	7 hari	- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto - Menteri Luar Negeri Sugiono - Menteri Kebudayaan Fadli Zon - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya - Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi - Rombongan Marching Band TNI
Malaysia	Prabowo-Ibrahim	27 Januari 2025	-	-	1 hari	- Menteri Luar Negeri Sugiono - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding - Menteri Perdagangan Budi Santoso - Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.



# Terima Kasih